

KETERLIBATAN ELIT LOKAL DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015

*LOCAL ELITE ENVIRONMENT IN THE IMPROVEMENT OF POLITICAL PARTICIPATION IN THE ELECTION
OF REGENT AND VICE REGENT OF NORTH TORAJA REGENCY IN 2015*

Muhammad Fadli ¹, Muh. Kausar Bailusy ², Jayadi Nas ³, dan Achmad Zulfikar ⁴

¹ Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

² Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

³ Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin

² Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Email: ¹ emfadlee03@gmail.com, ⁴ apa@kabarfikar.com

Abstract

This research aims to illustrate and analyze the role of local elites in increasing voter participation and impact of local elite involvement in North Lampung District Head Vice Regent and Vice Regent 2015 by using qualitative descriptive method. Data were obtained by using interviews as well as literature and document studies. The results indicate that local elites play a role in increasing participation in Pilkada in North Toraja according to their capacity. Local political elites socialize candidate pairs, become campaign teams and volunteer teams of candidates for regent / vice bupati candidates. Religious figures become part of the election organizers and socialize the implementation of Pilkada through religious activities. Adat leaders play a role by utilizing the charisma owned socialize information Pilkada to the community, build communication with the candidate pair then support it in the elections. The involvement of local elites in the implementation of North Sulawesi District Head Vice Regent and Vice Regent 2015 has a significant impact on the political participation of the community. Increasing the political participation of the people in Pilkada is not solely because of the involvement of local elites in disseminating information on Regional Head Election. However, there are other motivating factors that enable the community to actively participate, namely (1) to be given material rewards (including piloting gambling activities) and (2) the religious sentiments of one of the candidate pairs on religious leaders in worship activities.

Keywords: *Local Elite, Political Participation, Toraja Utara*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta dampak keterlibatan elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara serta studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit lokal berperan dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada di Toraja Utara sesuai kapasitasnya. Elit politik lokal mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati. Tokoh agama

menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu (1) diberikan imbalan materi (termasuk kegiatan judi Pilkada) dan (2) adanya sentimen keagamaan salah satu pasangan calon terhadap tokoh agama (pendeta) dalam kegiatan ibadah.

Kata Kunci: Elit Lokal, Partisipasi Politik, Toraja Utara

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana legal untuk pergantian kekuasaan. Disamping bertujuan untuk pergantian kekuasaan, Pemilu juga bermanfaat sebagai ruang evaluasi atas kepemimpinan lima tahunan oleh masyarakat. Pemilu dalam tataran praksisnya adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota serta wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan.

Selain itu, Pemilu juga merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeter dalam Gustiana A. Kambo dkk. (2016:1) yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat.

Sejak juni 2005, bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah yang sering disingkat dengan Pilkada langsung. Pilkada secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling sering terjadi adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang Pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan. Kedudukan kepala daerah sebelumnya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Pilkada dapat juga memberi ruang bagi elit-elit masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena elit masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. Keberadaan elit masyarakat seperti yang ada di Kabupaten Toraja Utara, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya atau disebut *Aluk Todolo*.

Keterlibatan para elit lokal, dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan masing-masing.

Tokoh politik, tokoh agama maupun tokoh masyarakat atau adat sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri untuk memberikan dukungan dalam Pilkada. Peranan kaum elit sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Elit lokal dalam pengaruhnya dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam Pilkada.

Pelaksanaan Pilkada langsung tentunya sangat dibutuhkan peran dari para elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat elit lokal merupakan sosok yang disegani dan patut untuk diteladani. Realita yang terdapat di masyarakat, tokoh-tokoh agama dan adat punya kharisma tersendiri yang dapat dan mampu merubah sifat, cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kaitannya dengannya Pilkada langsung yang dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara, partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari peranan tokoh agama dan tokoh adat dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi pada Pilkada.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Presiden Joko Widodo pun melalui Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2015 menetapkan hari pencoblosan Pilkada Serentak pada Rabu 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada. Hal ini dimaksudkan agar pada pesta demokrasi ini, masyarakat tidak berhalangan hadir di Tempat Pemungutan Suara dalam menggunakan hak pilihnya.

Secara sederhana partisipasi warga negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat ditinjau dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara dan lain-lain. Bentuk perilaku politik tersebut menjadikannya sesuatu yang menarik untuk melihat tingkat partisipasi politik masyarakat itu sendiri, apakah meningkat atau justru menurun. Selanjutnya dari sebelas kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pilkada, maka kabupaten yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Toraja Utara, dengan alasan pertimbangan bahwa dari sebelas kabupaten yang melaksanakan Pilkada

pada tahun 2015, kabupaten tersebut tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan dibandingkan pada saat pelaksanaan Pilkada sebelumnya pada tahun 2010.

Meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 bukanlah merupakan hal yang terjadi begitu saja. Selain peran penyelenggara Pilkada dalam melakukan sosialisasi, juga dibutuhkan dukungan dari pihak lain salah satunya adalah peran elit lokal. Keikutsertaan elit lokal mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada jelas sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.

Daerah lingkungan adat di Toraja dapat dibagi tiga yaitu; *pertama* daerah adat bahagian barat dengan penguasanya ialah *Makdika*, *kedua*, daerah utara penguasanya adalah *Siambe'/Sindo'*, dan *ketiga*, daerah *tallu lembangna* penguasanya adalah *Puang*. Penguasa Adat di tiap daerah lingkungan adat dibantu oleh pemimpin adat yang langsung menangani pelaksana adat sebagaimana mestinya. Pemimpin adat umumnya mempunyai nama yang sama untuk semua lingkungan kolektif dalam sebuah desa. Di wilayah Toraja Utara dipimpin oleh *Ambe' Tondok* ataupun *Toparengnge'* yaitu pemimpin masyarakat kolektif dalam sebuah desa. Tugasnya pluralistik, baik sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat untuk menjaga kestabilan masyarakat desanya.

Ambe' Tondok ataupun *Toparengnge'* sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat tergolong kedalam elit lokal yang tidak memerintah namun memiliki pengaruh dan peran yang besar di dalam masyarakatnya. Di dalam sebuah lembang atau desa di Kabupaten Toraja Utara, pengaruh *Ambe' Tondok* ataupun *Toparengnge'* sangat diperhitungkan dimana segala sesuatu yang akan dan telah dilakukan di dalam sebuah lembang harus seizin dan sepengetahuan oleh *Ambe' tondok* ataupun *Toparengnge'*. Meskipun di dalam lembang tersebut ada elit yang memimpin yaitu kepala lembang namun keberadaan elit tersebut tidak mampu mengurangi peran *Ambe' tondok*.

Seiring dengan perkembangan masa maupun perkembangan proses-proses sosial dan politik dalam masyarakat, bagaimanapun juga elit lokal harus mengikuti perkembangan proses-proses tersebut. Sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat Toraja, elit lokal terutama tokoh adat dan tokoh agama masih mendapat perhatian oleh masyarakat atau lebih diposisikan sebagai pemuka pendapat (*opinion leader*) oleh masyarakat hingga saat ini. Hal inilah yang dapat menjadi suatu peluang tersendiri bagi elit lokal baik yang secara tidak langsung dapat memengaruhi masyarakat khususnya dalam proses politik.

Keikutsertaan elit lokal khususnya tokoh agama dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 juga terlihat pada saat kejadian marahnya Wakil Bupati petahana, Frederik Buntang Rombelayuk kepada tokoh agama yang terkadang menggunakan kata *kaboro* dalam ceramah agama. Kata *kaboro* dalam Bahasa Toraja mengandung arti saling menyayangi atau saling mengasihi. Sementara kata *kaboro* merupakan *tagline* dari pasangan calon lawan petahana yaitu Pasangan No. Urut 1, Kalatiku Paembonan dan Yosia Rinto Kadang (KABORO).

Kemarahan Frederik Buntang Rombelayuk selaku wakil bupati petahana terhadap tokoh agama tersebut yang kemudian memicu rasa kurang senang terhadap Pasangan No. Urut 2, Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombelayuk (SOBAT). Sehingga para tokoh agama

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencoblosan Pilkada agar tidak memilih pasangan SOBAT. Himbauan serta ajakan tokoh-tokoh agama ini yang kemudian membuat masyarakat turut berpartisipasi dan diduga merupakan salah satu faktor kekalahan Pasangan Petaha dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis partisipasi elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Penelitian ini juga menggambarkan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta menggambarkan dan menganalisis dampak keterlibatan elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dengan memperlihatkan dan menggambarkan keterlibatan elit lokal dalam pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Diharapkan juga akan memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat memahami dan mengkaji permasalahan keterlibatan elit lokal kaitannya dengan partisipasi politik. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi KPU serta *stakeholders* lainnya untuk terus mengoptimalkan partisipasi politik pada Pemilu dan Pilkada.

Tinjauan Pustaka

Teori Elit

Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non- elite*). (Jayadi Nas, 2007:34)

Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit tradisional. (Robert Van Niel, 1984:12)

Secara struktural ada disebutkan tentang administrasi-administratur, pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan para intelektual, tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat adalah antara elit fungsional dan elit politik. Yang dimaksud dengan elit fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalu maupun masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang (Indonesia) yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan, menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sedangkan golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis daripada praktis. (Robert Van Niel, 1984:12)

Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron). (Jayadi Nas, 2007:33)

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italias, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. (Jayadi Nas, 2007:34)

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. (Jayadi Nas, 2007:34)

Sejalan dengan Pareto, Gaetano Mosca, seorang teoritis elit lainnya, mengatakan bahwa tiap masyarakat – entah suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil – selalu membentuk dua kelas utama: yang memimpin (*a class that rules*) dan yang dipimpin (*a class that is ruled*). Mosca (1939), menjelaskan sebagai berikut:

“The first class, always the less numerous, performs all political functions, monopolizes power and enjoys the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled by the first.” (Kelas pertama, selalu semakin sedikit, melakukan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati kelebihan yang dimilikinya, sedangkan kelas kedua, semakin banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh yang pertama.)

Selanjutnya, Mosca (1939) menjelaskan hubungan dinamis antara elit dan massa. Dalam pandangannya, para elit berusaha bukan hanya mengangkat dirinya di atas anggota masyarakat lain, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya, melalui para “sub-elit” yang terdiri dari kelompok besar dari “seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur pemerintahan, manager, administrator, ilmuwan lainnya. Setiap masyarakat di manapun berada akan selalu dipimpin oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa atas sejumlah besar anggota masyarakat lainnya, yang disebut massa, untuk tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya.

Massa bersedia untuk tunduk dan mentaati perintah-perintah tersebut karena pada diri elit melekat kekuasaan yang jumlahnya lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh massa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan yang ada dalam masyarakat tidak terdistribusikan secara merata.

Terdapat sekelompok kecil individu dengan jumlah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan sejumlah besar individu dengan kekuasaan yang sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali.

Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah.

Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Herbert McClosky mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai:

The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). (Herbert McClosky dalam Miriam Budiarjo, 2015:367)

Definisi yang dikemukakan McClosky tersebut menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan sukarela dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai:

By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. (partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif). (Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson dalam Miriam Budiarjo, 2015:368)

Pada perspektif pengertian yang generik Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,

menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. (Miriam Budiarjo, 2015:367)

Selanjutnya Ramlan Surbakti (2010:180) juga memberikan pengertian yang sejalan dengan pengertian partisipasi politik diatas yakni: partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*). Dalam sistem pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist* profesional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Sifat Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai:

By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. (partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan,

mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (Huntington dan Nelson dalam Miriam Budiarjo, 2015:368)

Banyak kalangan yang tidak memberi batasan sifat partisipasi politik antara partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*) dengan partisipasi yang otonom (*autonomous participation*). Bahkan ada beberapa ahli yang menganggap tindakan yang dimobilisasi atau yang dimanipulasikan tidak termasuk partisipasi politik. Myron Wiener, umpamanya, menekankan sifat sukarela dari partisipasi, dengan mengemukakan argumentasi bahwa “menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat-rapat umum atas perintah pemerintah tidak termasuk (partisipasi politik)”. (Myron Wiener dalam Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, 1984:9) Selain Myron Wiener, beberapa ahli yang lebih menfokuskan partisipasi politik hanya pada kegiatan politik yang sifatnya mandiri, seperti McClosky, Almond, Norman H. Nie dan lainnya, mereka menganggap bahwa partisipasi politik terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh pelaku politik atas inisiatif diri sendiri.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang, partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi otonom dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah.

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk- bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kekuasaan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Gabriel A. Almond yang dikutip oleh Mas'ood dan MacAndrews (2008:57) dalam buku Perbandingan Sistem Politik, membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Politik

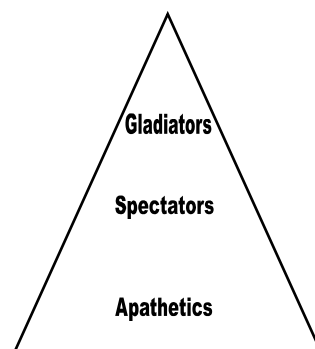
| Konvensional | Non-Konvensional |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian suara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengeboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan) |

Sumber : Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews (2008)

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Menurut L. Milbrath dan M. Goel yang dikutip oleh Miriam Budiarjo (2015:372) telah membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat keterlibatan aktifitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya.

Bagan 1. Piramida Partisipasi Politik



Sumber: L. Milbrath dan M. Goel (1977) dalam Miriam Budiarjo (2015)

Identitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktifitas politik dikenal sebagai *gladiators* (pemain), yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik. Adapun yang masuk dalam kelompok *gladiators* adalah pejabat publik atau calon pejabat publik dan para fungsionaris partai politik atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu (*FullTime*).

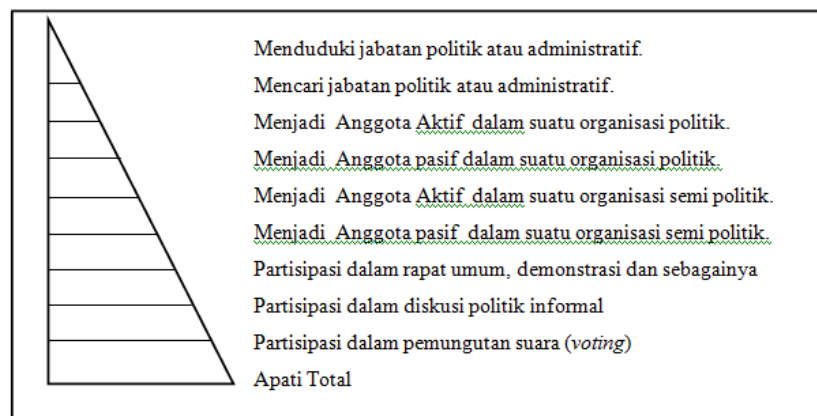
Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal sebagai *spectators* (penonton), yaitu orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam Pemilu. Mereka yang digolongkan ke dalam kelompok ini adalah mereka yang ikut menghadiri kegiatan politik yang menyita waktu, anggota dalam kelompok kepentingan, pelobi politik, pemilih dalam Pemilu, serta orang yang terlibat dalam diskusi politik dan pemerhati dalam pembangunan politik.

Sedangkan lapisan terbawah adalah kelompok yang *apathetics* (apatis), yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik.

Partisipasi politik pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataannya dengan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara dengan negara lain, dengan kata lain tidak semua warga negara ikut dalam proses politik. Fakto-faktor yang diperkirakan dengan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hampir senada dengan Milbrath dan Goel, Michael Rush dan Philip Althoff yang dikutip oleh Damsar dalam Pengantar Sosiologi Politik mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh bagan hierarki partisipasi politik, dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

Bagan 2. Hierarki Partisipasi Politik



Sumber : Rush dan Althoff (2003) dalam Damsar (2010), hal. 185

Dari gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althoff diatas dapat kita asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya semakin kebawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik. Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada Pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suatu tersebut ialah dipilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Teori Pilihan Rasional

Sebuah tindakan rasional akan selalu didasarkan pada untung (*benefit*) dan ruginya (*cost*) sebuah pilihan tindakan tersebut diambil. Dalam hal pilihan tindakan untuk mendukung atau memilih sebuah partai politik atau kandidat dalam sebuah Pemilu ataupun Pilkada, masyarakat juga mengkalkulasikan untung dan ruginya keputusan mereka dalam mendukung partai politik atau kandidat. Manfaat apa yang akan diberikan oleh kandidat, dan apa kerugiannya jika mereka mendukungnya merupakan sesuatu yang menjadi sebuah pertimbangan untuk memilih kandidat dalam Pilkada.

Secara teoritis pendekatan ekonomi atau pilihan rasional diadaptasi dari buku “*An Economic Theory of Democracy*” karangan Anthony Downs. Buku yang dipublikasikan pada tahun 1957 tersebut menjelaskan bahwa pilihan rasional dapat di jelaskan secara ekonomi, yakni dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalisir resiko. Model pilihan rasional (*Rational Choice Model*) sebagai salah satu pendekatan dalam melihat atau menelusuri pola dukungan masyarakat terhadap kandidat.

Menurut Downs melalui deskripsinya mengenai *homo economicus*, bahwa sang pemilih rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri atau walaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan orang lain. Downs menganalogikan partai politik seperti *entrepreneur* dalam mencari keuntungan ekonomi. *Entrepreneur* harus bisa meyakinkan konsumen soal manfaat dari produk yang dijual. Tentunya aspek manfaat tersebut dipahami juga secara rasional oleh konsumen. Sama halnya dengan partai politik atau kandidat dalam sebuah pemerintahan, bagaimana kebijakannya mampu menumbuhkan kepercayaan pemilih soal manfaat yang diperoleh pemilih. Dengan begitu, pemilih akan memilih partai atau kandidat yang memberikan manfaat tersebut. (Anthony Downs dalam KPU Kabupaten Sampang, 2015:14)

Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa masyarakat pemilih mengetahui apa yang mereka inginkan dan menjadi kebutuhan mereka, mengevaluasi program atau kandidat dan menyesuaikan dengan kepentingan mereka dan kemudian menetapkan pilihan tindakan atau dukungan mereka kepada kandidat. Pilihan sikap masyarakat untuk mendukung atau tidak

mendukung kandidat bisa diasumsikan sebagai sebuah tindakan rasional. Dukungan masyarakat terhadap kandidat bisa terbentuk karena hasil evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja dan perilaku kandidat.

Meskipun pemilih dalam teori pilihan rasional tidak memahami secara detail kebijakan pemerintah. Akan tetapi ia dapat mengambil kesimpulan dari proses generalisasi dari kebijakan yang diambil. Sejauh mana kebijakan tersebut menguntungkan secara pribadi dan masyarakat umum. Pemilih dalam teori pilihan rasional juga membandingkan dari sekian alternatif pilihan yang tersedia, lalu mulai memberikan peringkat sebagai acuan dalam preferensi pilihannya. Pemilih model ini juga memberikan penghargaan kepada partai dan calon yang dirasa menguntungkan dengan cara memilihnya pada Pemilu atau Pilkada. Karenanya, ia harus memiliki informasi memadai untuk menentukan pilihannya. Sekaligus memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

Metode

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, fokus penelitian pada elit lokal Toraja Utara.

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian diarahkan untuk mengetahui atau mengkaji peran dan dampak keikutsertaan elit lokal dalam kaitannya dengan partisipasi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam serta studi pustaka dan dokumen. Penulis melakukan wawancara kepada informan yang mengetahui tema penelitian dengan menggunakan metode *purposive*. Teknik pengumpulan data melalui: (1) wawancara mendalam, penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) mengacu pada pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan berlanjut. Pedoman wawancara berisi beberapa poin konsep kunci pertanyaan yang kemudian pertanyaan tersebut berkembang mengikuti alur pembahasan, dan (2) studi pustaka dan dokumen, pengumpulan data yang sumbernya dari buku-buku/literatur yang berkaitan dengan partisipasi politik, karya-karya ilmiah sebelumnya yang mendukung penelitian ini, atau referensi lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian yang fokusnya tentang partisipasi politik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif sehingga serangkaian data dapat dimengerti oleh pembaca. Analisis data kualitatif deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, perilaku, atau tindakan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-

kata dan bahasa. Proses analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Elit Lokal Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015

Berbagai macam bentuk partisipasi yang dilakukan oleh elit lokal di Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Sebagian dari elit-elit lokal itu ada yang menjadi penyelenggara Pilkada dengan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan ada juga yang terlibat menjadi tim pemenangan pasangan calon.

Keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat sebagai penyelenggara Pilkada sangat membantu KPU dalam sosialisasi kepada masyarakat, karena selain sebagai elit lokal yang menjadi panutan masyarakat juga sebagai penyelenggara Pilkada. Dua peran yang dimiliki oleh elit lokal tersebut membuat mereka dengan mudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

Keterlibatan tokoh agama maupun tokoh adat Toraja Utara yang menjadi penyelenggara Pilkada merupakan salah satu bentuk dari partisipasi mereka dalam menyukseskan perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Walaupun jumlah dari tokoh agama dan tokoh adat ini tidak banyak, namun cukup memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Pelibatan elit lokal, khususnya tokoh agama dan tokoh adat oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. KPU memanfaatkan ketokohan elit lokal untuk menyampaikan program-program penyelenggaraan Pilkada melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti dalam kegiatan ibadah ataupun kegiatan pesta *rambu tuka'* atau *rambu solo'*.

Rush dan Althoff mengklasifikasikan bentuk kegiatan partisipasi politik ke dalam hierarki partisipasi politik. Dimana kegiatan partisipasi dalam diskusi politik informal berada pada tingkatan ketiga terendah setelah partisipasi dalam pemungutan suara (*voting*) dan apati total. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh adat tersebut dapat diasumsikan sebagai partisipasi dalam diskusi politik informal. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Almond dalam bentuk partisipasi yang bersifat konvensional.

Selain berpartisipasi sebagai penyelenggara Pilkada, ada juga elit-elit lokal yang ikut serta dalam tim kampanye calon bupati dan wakil bupati. Selain keterlibatan langsung mereka, sebagian juga ikut dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi pemilih. Tim kampanye melibatkan elit-elit lokal karena mengingat ketokohan mereka yang masih menjadi panutan masyarakat.

Keikutsertaan elit lokal dalam berpartisipasi dengan cara dilibatkan oleh tim kampanye pasangan calon marak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencari dukungan para tokoh agama dan tokoh adat. Sehingga dengan pengaruh mereka masyarakat pemilih akan ikut juga memilih calon yang didukung oleh elit tersebut.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh elit lokal dengan ikut serta menjadi tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati ataupun diikutkan dalam kegiatan-kegiatan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keikutsertaan elit-elit lokal di Toraja Utara dalam kegiatan pasangan calon bupati dan wakil bupati terkait dengan hierarki partisipasi politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff.

Berbeda dengan tokoh agama, sebagian tokoh adat berpartisipasi dalam Pilkada lebih mengarah kepada bentuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Tokoh adat Toraja Utara yang biasa disebut sebagai *ambe' tondok* atau *toparenge'* melakukan pertemuan dengan bakal calon bupati dan wakil bupati serta partai politik pengusung untuk mengetahui visi misi dari seorang bakal calon. Dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara tokoh adat dengan bakal calon yang akan didukung dalam Pilkada.

Setelah diperoleh kesamaan tujuan serta kesepakatan visi misi diantara ketiga belah pihak maka bakal calon bupati dan wakil bupati akan didorong maju sebagai calon bupati/wakil bupati. Calon bupati dan wakil bupati dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya tokoh adat menyampaikan calon bupati dan wakil bupati yang didukung kepada masyarakat pemilih di lingkungannya.

Hampir sejalan dengan tokoh-tokoh adat di Toraja Utara, elit-elit politik sudah pasti memiliki kepentingan langsung dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Elit politik ikut aktif berpartisipasi dalam tim kampanye, walaupun tidak, dia akan aktif mensosialisasikan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partainya. Dengan harapan pasangan calon yang diusung akan memenangkan perhelatan lima tahunan tersebut.

Peran Elit Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015

1. Elit Politik

Keterlibatan elit politik lokal pada perhelatan Pilkada di Toraja Utara sangat tinggi. Mereka memiliki kekuasaan dan kharisma sehingga mereka dimasukkan dalam tim kampanye. Para elit politik memainkan perannya dalam tim kampanye untuk mendapat dukungan dari pemilih karena mereka menjadi panutan atau acuan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka aktif melakukan kampanye untuk pasangan calon yang didukungnya.

Almond menyatakan bahwa bentuk partisipasi politik yang tergolong dalam partisipasi konvensional diantara adalah kegiatan kampanye. Mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh elit-elit politik lokal menghadapi perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi politik yang sesuai

dikemukakan oleh Almond. Kemudian bila menilik tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi yang dikemukakan oleh Milbrath dan Goel, elit-elit politik lokal dikategorikan sebagai *gladiators*. Intensitas keterlibatan mereka dalam aktivitas politik cukup tinggi. Mereka adalah para pejabat publik atau calon pejabat publik dan para fungsionaris partai politik.

Cara lain yang dimainkan oleh elit-elit politik di Toraja Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Cara-cara pragmatis dilakukan termasuk di dalamnya mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi. Kegiatan bagi-bagi uang biasa terjadi menjelang pelaksanaan hari pencoblosan sekitar 3 atau 2 hari sebelumnya. Penggunaan istilah biaya politik ini sering digunakan oleh elit-elit politik untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan memberikan imbalan materi kepada pemilih. Biaya politik dilakukan dengan dalih mengganti biaya operasional, pengganti uang bensin, rokok atau makan minum. Hal ini dilakukan oleh elit politik untuk memberikan dorongan atau rangsangan kepada pemilih agar mau ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada.

Praktek politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon yang melibatkan elit politik untuk mempengaruhi pemilih dapat saja meningkatkan partisipasi pemilih. Peningkatan partisipasi tersebut bukan merupakan kesadaran dari pemilih sendiri melainkan karena adanya faktor pendorong lain yaitu imbalan materi. Kondisi ini menjadikan pemilih tidak lagi memiliki idealisme dalam menentukan pilihannya karena sudah dibeli oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pola partisipasi pemilih tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bersifat *mobilized* (dimobilisasi) sesuai dengan yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson.

2. Tokoh Agama

Pendidikan serta bimbingan dari tokoh agama seharusnya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan baik pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Tokoh agama sebagai panutan dapat memberikan teladan kepada masyarakat agar tercipta suasana yang sejuk selama masa tahapan Pilkada. Melakukan kerja sama dengan penyelenggara Pilkada mengajak masyarakat untuk tidak menjadi apatis melainkan ikut aktif dalam memilih pemimpin Kabupaten Toraja Utara lima tahun kedepannya.

Badan Pekerja Sinode (BPS) selaku lembaga agama terbesar di Toraja Utara yang membawahi sekitar 70% pemeluk agama memiliki peran yang sangat penting dalam Pilkada di Toraja Utara. Sehingga tidak salah jika penyelenggara Pilkada bekerja sama dengannya untuk ikut membantu mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada. selain itu, pengaruh tokoh agama dianggap sentral oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati karena memiliki banyak jemaat yang loyal kepada mereka. Oleh karena itu kontestan Pilkada, berlomba mencari dukungan dari tokoh agama untuk mendapatkan simpati dari pemilih.

3. Tokoh Adat

Kharisma yang dimiliki oleh tokoh adat sebagai panutan dalam masyarakat dimanfaatkan oleh penyelenggara Pilkada untuk membantu melakukan sosialisasi. Sosialisasi mengenai Pilkada sering dilakukan oleh tokoh adat dalam lingkungannya pada kegiatan-kegiatan masyarakat karena pelaksanaan kegiatan tersebut selalu melibatkan tokoh adat.

Selain dimanfaatkan penyelenggara Pilkada untuk sosialisasi, peranan tokoh adat dalam percaturan politik di Kabupaten Toraja Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena dapat menjadi satu kekuatan politik yang dapat mempengaruhi pendapat masyarakat. Karena memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat, maka tokoh adat diperebutkan oleh pasangan calon untuk direkrut dijadikan sebagai tim kampanye atau paling tidak sebagai tim relawan. Mereka dapat memberikan pengaruh kepada warga masyarakat yang berada dalam wilayah adat yang dikuasainya.

Walaupun menjadi rebutan oleh pasangan calon dalam mencari dukungan masyarakat, kemampuan tokoh adat mempengaruhi pilihan politik masyarakat tidak sama dengan tokoh agama. Perbedaan pengaruh keduanya terletak pada jangkauan wilayah dari keduanya. Tokoh agama tidak terbatas oleh sekat-sekat wilayah adat tertentu, mereka dapat masuk ke semua tempat peribadatan di seluruh Gereja Toraja. Sedangkan tokoh adat hanya dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat yang ada di wilayah adatnya, dia tidak dapat memasuki wilayah tokoh adat lainnya.

Kendati demikian, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terlebih lagi pada tataran keluarga yang terhimpun dalam satu Tongkonan. Mereka mengkampanyekan pasangan calon dukungan mereka kepada masyarakat di lingkungannya terlebih kepada keluarganya.

Erat hubungan antara elit politik dengan tokoh adat yang ada di Kabupaten Toraja Utara terkait pelaksanaan Pilkada. Keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa sebagian tokoh adat ikut menjadi tim kampanye ataupun tim relawan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mereka menjadi bagian dari pendukung setelah sebelumnya melakukan lobi-lobi politik dengan salah satu pasangan untuk mengkomodir kepentingannya beserta masyarakatnya. Sementara itu elit politik mengakomodir kepentingan tokoh adat agar mendapat dukungan sehingga dapat memenangkan pertarungan Pilkada.

Kesimpulan

Partisipasi elit lokal di Toraja Utara dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kapasitas dari setiap elit lokal. Elit lokal yang berpartisipasi sebagai penyelenggara Pilkada merupakan tokoh agama dan tokoh adat yang direkrut oleh KPU atau Panwaslu Kabupaten Toraja Utara. Elit politik yang merupakan representasi dari partai politik sudah barang tentu menjadi bagian dari tim kemenangan pasangan calon. Ada juga sebagian tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung dalam tim kemenangan pasangan calon bupati/wakil bupati. Sedangkan tokoh agama (BPS) turut serta mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan kegamaan.

Elit politik memainkan peran dalam Pilkada tidak lepas dari kepentingan untuk mensosialisasikan pasangan calon yang diusung oleh partai politiknya. Mereka masuk ke dalam tim kampanye ataupun tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati dan

mengkampanyekannya ke masyarakat dengan berbagai macam cara termasuk menggunakan politik uang.

Tokoh agama melalui BPS berperan dalam Pilkada dengan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat agar memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Tokoh agama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan bersama dengan penyelenggara Pilkada. Selain melakukan bimbingan kepada masyarakat, BPS juga menghimbau kepada pasangan calon agar berkompetisi dengan cara-cara yang jujur. Ada juga sebagian tokoh agama ikut terlibat dalam tim pasangan calon dan melakukan kampanye.

Tokoh adat memiliki peran penting dalam masyarakat Toraja Utara oleh karena itu penyelenggara Pilkada memanfaatkan kharisma yang dimiliki oleh tokoh adat untuk mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat. Selain itu ada juga tokoh adat yang membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. Tokoh adat menyerukan kepada masyarakat yang ada di lingkungan adatnya agar memilih pasangan calon yang telah membuat komitmen dengan tokoh adat tersebut.

Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 memiliki dampak yang cukup baik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini dikarenakan peran elit lokal dan penyelenggara Pilkada dalam mensosialisasikan informasi tentang Pilkada. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu dengan diberikan imbalan materi.

Daftar Pustaka

Bottomore, T. B. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.

Budiarjo, Miriam (ed.). *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010.

Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik (terjemahan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Faulks, Keith. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung; Penerbit Nusa Media, 2014.

Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Sangkala Pulsar, 1984.

Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAnrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Mosca, Gaetano. *The Ruling Class*. London: Hill Book Company, 1939.

- Nas, Jayadi. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2007.
- Niel, Robert Van. *Munculnya Elite Modern di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Varma, S. P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Armunto, Andi Ali. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2006.
- Kambo, Gustiana A. dkk. *Optimalisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Laporan. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- KPU Kab. Sampang. *Laporan Hasil Penelitian Analisa Perilaku Pemilih dalam Memilih Calon atau Peserta Pemilu di Kabupaten Sampang (Studi Kasus Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014)*. Laporan. Sampang: KPU Kabupaten Sampang, 2015.